



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN  
REVISI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan keseragaman langkah dalam tata cara usulan perubahan alokasi anggaran, perlu disusun panduan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Revisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1569 Tahun 2021);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Revisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**





**NOMOR 3/PR.02/5107/2026**

**TAHUN 2026**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
JL. BHAYANGKARA NO. 6 AMLAPURA-BALI  
TELP. (0363) 23504**

 <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEMM</b></p>	NOMOR SOP	3/PR.02.1/5107/2026
	TANGGAL PENGESAHAN	5 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">Plt. SEKRETARIS KPU KABUPATEN KARANGASEM</p>  <p style="text-align: center;"><b>I GEDE SUWENDA</b> NIP. 197906262008111001</p>
	NAMA SOP	SOP Pelaksanaan Revisi Anggaran
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>3 Peraturan Presiden Reuplik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;</li> <li>5 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per- 9/PB/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;</li> <li>6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 076.2.658131/2025;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menguasai Pengoperasian Komputer;</li> <li>2 Menguasai pengelolaan perencanaan keuangan;</li> <li>3 menguasai pengolahan dengan menggunakan program-program komputer.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP PENYUSUNAN SAKIP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran;</li> <li>2 Perangkat Komputer;</li> <li>3 Alat Tulis Kantor.</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak dapat melaksanakan realisasi anggaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi SAKTI</li> <li>2 Aplikasi SATUDJA</li> </ol>	

### FLOWCHART PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		KPA	Kasubbag Rendatin	PPK	OPERATOR	KANWIL DJPB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan usulan revisi Anggaran						Usulan Revisit	3 Hari	Matrik Semula Menjadi	-
2	Menerima permintaan usulan revisi dan Menugaskan revisi anggaran						Matrik Semula Menjadi	2 Jam	Matrik Semula Menjadi	-
3	Menerima permintaan usulan revisi anggaran dan menyusun nya melalui aplikasi SAKTI						Matrik Semula Menjadi, Apliaksi SAKTI	1 Hari	Surat Pengantar, Data Revisi	-
4	Mengkoreksi hasil penginputan SAKTI						Surat Pengantar, Data Revisi	2 Jam	Surat Pengantar, Data Revisi	-
5	Memparaf Rencana Kerja Anggaran						Surat Pengantar, Data Revisi	1 Jam	Data Revisi yang diparaf	-
6	Menyetujui Revisi Anggaran						Data Revisi yang diparaf	1 Jam	Revisi Rencana Kerja di tandatangani KPA	-
7	Mengupload berkas revisi ke Kanwil Anggaran dalam aplikasi SAKTI						ADK, Matrik Semula Menjadi, Surat Pengantar, DIPA Revisi Terakhi, Konsep Revisi DIPA	1 Jam	Print Out upload tanda terima revisi	-
8	Mendownload hasil revisi dan mengarsipkannya						Internet	6 Hari	ADK DIPA	-

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Sub Bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Perencanaan dalam pelaksanaan revisi anggaran KPU Kabupaten Karangasem;
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Amlapura,  
Pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Plt. Sekretaris,

